

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Arba Mutiara
arbamutiara123@gmail.com
Universitas Tidar

Fitria Ramadhanti
fitriaramadhanti81@gmail.com
Universitas Tidar

Galuh Nur Rahma
galuhnrr31@gmail.com
Universitas Tidar

Abstract

This study aims to evaluate the extent to which Local Own Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) affect regional spending in regencies/cities in Central Java Province during the period from 2017 to 2020. The data used is sourced from secondary data obtained through publications from the Directorate General of Financial Equalization and the Central Bureau of Statistics during that period. The variables analyzed include PAD, DAU, DAK, and regional spending. This study uses panel data analyzed with multiple linear regression. Based on the analysis results, the most suitable model in this research is the Common Effect Model (CEM). The findings indicate that PAD and DAU have a significant impact on regional spending, while DAK does not show a significant effect. Collectively, the three variables (PAD, DAU, and DAK) have been proven to have a significant effect on local government spending in the regencies/cities of Central Java from 2017 to 2020.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, regional spending*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, sistem dan prosedur manajemen di pemerintah daerah mengalami perubahan sangat besar. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang N0.33 merupakan sistem pembagian keuangan adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien guna menjalankan rangka desentralisasi pendanaan. Hal ini menggunakan banyak pertimbangan seperti potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besarnya anggaran yang direncanakan untuk tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)) kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya. Selain

itu, terdapat sumber pendanaan sendiri yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

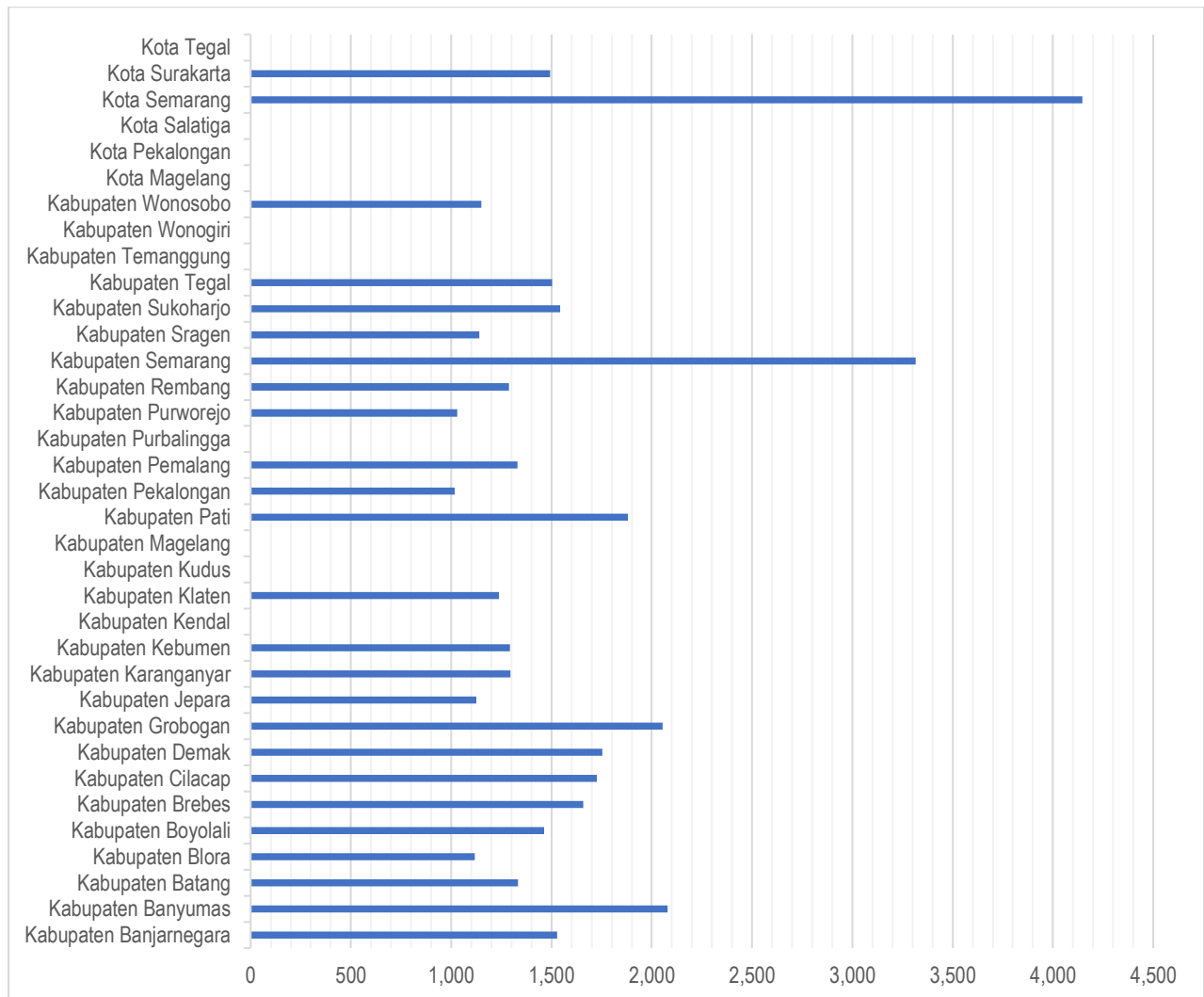
Anggaran Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bagaimana pemerintah menentukan program dan kegiatan mana yang paling penting. Secara teoritis, terdapat hubungan kausal antara PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang sesungguhnya dan memberikan keleluasaan yang tinggi dalam penganggaran, sehingga kenaikan PAD umumnya berdampak positif terhadap peningkatan belanja daerah. DAU bersifat block grant dan lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga biasanya turut mendorong peningkatan belanja publik secara umum. Sedangkan DAK bersifat spesifik (*earmarked grant*) untuk kegiatan tertentu, sehingga perannya terhadap belanja daerah memiliki ketergantungan yang besar dan program prioritas yang ditentukan pusat. Dengan demikian, perbedaan sifat dan fleksibilitas ini seharusnya menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap pola dan tingkat belanja daerah.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi ini meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, mencatatkan peningkatan PAD yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 pendapatan asli daerah sebesar Rp.4.328,94 milyar rupiah, tahun 2018 Rp.4.506,41 milyar rupiah, tahun 2019 Rp.4.633,93 milyar rupiah, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.4.128,91 milyar rupiah dikarenakan adanya pandemi, dan pada tahun 2020 langsung meningkat pesat menjadi Rp.4.764,05 milyar rupiah. Sementara itu, daerah seperti Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Magelang terus mendorong peningkatan PAD dengan mengoptimalkan sektor pertanian dan pariwisata lokal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, periode tahun 2017-2020, terlihat bahwa kapasitas fiskal daerah (KFD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat yang sangat bervariasi. Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan dalam kemampuan keuangan tiap-tiap daerah, terutama terkait pendapatan asli

daerah (PAD) dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020



Sumber: Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Pada grafik di atas dapat terlihat sebuah fenomena yang menarik, di mana Kota Semarang menempati posisi tertinggi dalam indeks KFD, yang mengindikasikan kemampuan fiskal yang sangat kuat dan relatif mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Namun, beberapa daerah lain seperti Kota Tegal, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kudus memperlihatkan indeks KFD yang relatif rendah, hal ini menunjukkan kemampuan fiskal yang rendah dan tingginya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari luar daerah.

Jawa Tengah, yang terdiri dari berbagai kabupaten dan kota, menunjukkan dinamika yang menarik dalam pengelolaan belanja daerah. Fluktuasi pendanaan dari PAD, DAU, dan DAK menunjukkan ketergantungan fiskal yang berbeda-beda antar wilayah. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan di Bengkulu, Kalimantan Timur dan Jawa Barat, akan tetapi, hasil yang beragam ditunjukkan pada beberapa penelitian lain. Penelitian terkait oleh Septriani (2023) di Bengkulu menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan adjusted R^2 sebesar 91,95%. Penelitian lainnya seperti Ernayani (2017) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara itu, DAK tidak memiliki pengaruh signifikan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan basis ekonomi dan struktur fiskal yang lebih kompleks, Jawa Tengah, perlu diuji lebih lanjut pengaruhnya. Kajian yang meneliti pengaruh simultan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2017-2020 secara spesifik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk diketahui guna memahami kontribusi masing-masing sumber pendanaan terhadap belanja pembangunan daerah.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada dana dari pemerintah pusat. Komponen PAD meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Tingginya PAD menunjukkan tingkat

kemandirian daerah yang lebih besar, terutama dalam mendukung belanja pembangunan seperti belanja modal yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik (Ernayani, 2017).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer tahunan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada seluruh daerah otonom, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan serta menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, agar daerah-daerah tersebut mampu membiayai kebutuhannya dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan (Simanjuntak & Ginting, 2019). Karena bersifat *block grant*, penggunaannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas kebijakan masing-masing daerah. DAU berperan penting dalam menekan kesenjangan fiskal dan memperkuat kapasitas keuangan daerah. Namun, tingginya ketergantungan terhadap DAU juga dapat mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal suatu daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan diberikan kepada daerah yang ditetapkan untuk membiayai program-program spesifik yang menjadi tanggung jawab daerah serta selaras dengan agenda prioritas nasional (Ernayani, 2017). Tidak seperti DAU yang fleksibel, DAK bersifat *earmarked*, artinya penggunaannya telah ditentukan untuk tujuan tertentu. Dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi di daerah. Selain itu, DAK juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan belanja modal karena diarahkan untuk kegiatan investasi yang bersifat strategis.

Belanja Daerah

Belanja daerah merujuk pada seluruh pengeluaran dari kas umum daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah daerah dan tidak menimbulkan penerimaan kembali ke kas daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja modal adalah semua pengeluaran kas daerah dalam satu tahun

anggaran yang dibebankan pada anggaran daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang menyebabkan penurunan aset bersih selama satu periode anggaran dan tidak menimbulkan pengembalian dana (Nur, 2015). Ernayani (2017) juga menegaskan bahwa belanja daerah adalah bentuk pengeluaran dari kas umum daerah yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana serta menjadi tanggungan keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tanpa adanya pengembalian dana ke kas daerah.

Secara garis besar, belanja daerah terbagi menjadi dua jenis:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program atau kegiatan tertentu. Contohnya antara lain belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dana bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung (BL) merupakan pengeluaran yang secara langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja ini mencakup belanja pegawai yang terlibat dalam program, pembelian barang dan jasa, serta pengeluaran untuk belanja modal.

HIPOTESIS PENELITIAN

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020

H₄: PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan cara mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data laporan realisasi APBD dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 daerah selama periode 2017 hingga 2020, sehingga total unit observasi berjumlah 175. Adapun sampel yang digunakan merupakan bagian spesifik dari laporan realisasi APBD yang tersedia di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang sama, yaitu data terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Belanja Daerah.

Model Analisis

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Pemilihan model ini didasarkan pada hasil uji pemilihan model, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil ketiga uji tersebut, CEM dinilai sebagai model yang paling tepat dan efisien karena secara statistik diasumsikan bahwa seluruh kabupaten/kota memiliki pola hubungan yang seragam terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Untuk menguji hipotesis, digunakan metode analisis regresi linear berganda, dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Belanja Daerah (BG)

α = konstanta (intersep)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e_{it} = Error term

Model ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen yang terdiri dari: X_1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), X_2 Dana Alokasi Umum (DAU), dan X_3 Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen berupa belanja daerah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017–2020.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan data panel, yang diolah menggunakan *software EViews 12*. Data yang digunakan merupakan gabungan antara data *cross-section* dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time series* selama periode 2017 hingga 2020. Teknik analisis yang diterapkan mencakup tiga tahap utama, yaitu pemilihan model terbaik melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier; pengujian asumsi klasik melalui uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model; serta pengujian signifikansi menggunakan uji t untuk melihat pengaruh variabel secara parsial dan uji F untuk menguji pengaruh variabel secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaruh yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2020 antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD__X1_	0.647752	0.174117	3.720212	0.0003
DAU__X2_	1.647656	0.511782	3.219451	0.0016
DAK__X3_	-0.084363	1.203829	-0.070079	0.9442
C	5.31E+08	2.00E+08	2.651973	0.0090
Root MSE	5.45E+08	R-squared		0.464378
Mean dependent var	2.36E+09	Adjusted R-squared		0.452562
S.D. dependent var	7.47E+08	S.E. of regression		5.53E+08
Akaike info criterion	43.12607	Sum squared resid		4.15E+19
Schwarz criterion	43.21012	Log likelihood		-3014.825
Hannan-Quinn criter.	43.16023	F-statistic		39.30339
Durbin-Watson stat	2.706654	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Olahan Eviews

Berdasarkan hasil tabel, didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.65 X_1 + 1.65 X_2 - 0.084 X_3 + 530909435.53$$

Dari persamaan tersebut nilai konstanta diperoleh sebesar 530909435.53, hal ini dapat diartikan jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) naik satu juta rupiah secara rerata, maka variabel Belanja Daerah juga akan naik sebesar 530909435.53. Dari persamaan tersebut juga dapat dilihat nilai koefisien dari tiga variabel tersebut. Jika nilai koefisien dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka variabel Belanja Daerah juga akan naik dan jika nilai koefisien pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) naik secara satu juta rupiah maka akan menurunkan nilai variabel Belanja Daerah sebesar nilai koefisien tersebut.

Tabel tersebut dapat pula dilihat bahwa nilai Adjusted R-square sebesar 0.452562, mempunyai arti bahwa variasi naik turunnya Belanja Daerah sebesar 45,26% dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sisanya sebesar 54,74% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa analisis regresi linear berganda layak digunakan karena tidak menyimpang dari asumsi klasik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat dalam hasil pengujian statistik diatas, tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,0003 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ferdiansyah, Deviyanti, dan Pattisahusiwa (2018), yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada dampak yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,0016 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dampak signifikan pada wilayah/kota Jawa Tengah. Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian (Mulyati & Yusriadi, 2018), yang dilakukan di Provinsi Aceh dan menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun, hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.9442 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Sehingga, penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Handayani & Nuraina, 2012), yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Madiun karena kebutuhan yang sulit diperkirakan.

Pada tahun 2017-2020, besarnya dana alokasi khusus (DAK) kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami naik turun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS, rata-rata DAK tertinggi terdapat pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp309,66 juta dan rata-rata DAK terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp302,31 juta. Sedangkan rata-rata belanja daerah mencapai Rp2,37 miliar (2017) dan Rp2,34 miliar (2020), sehingga DAK berkontribusi sekitar 13,06% pada tahun 2017 sementara pada tahun 2020 DAK hanya berkontribusi sekitar 12,91% terhadap belanja daerah. Komponen lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp393,57 juta dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp961,23 juta. Angka ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan di Jawa Tengah lebih ditopang oleh PAD dan DAU yang lebih fleksibel penggunaannya, sehingga meskipun DAK cukup besar secara nominal, pengaruhnya terhadap belanja daerah tidak signifikan. Terlebih, selama pandemi COVID-19, penganggaran lebih diutamakan pada belanja tak terduga dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari refocusing DAU, SILPA, dan bantuan pusat non-DAK.

Sebaliknya, dalam penelitian (Septriani, 2023) di Provinsi Bengkulu, DAK ditemukan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Rata-rata DAK tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp192.179 juta, dan terendah pada 2021. Kenaikan DAK tahun 2019

mendorong peningkatan belanja daerah hingga 95,13%, terutama pada belanja langsung dan belanja modal yang realisasinya mencapai 93,32%. Selama pandemi COVID-19, Bengkulu mengoptimalkan DAK melalui percepatan realisasi, pencairan TU berulang, serta refocusing APBD untuk bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan di Bengkulu masih sangat bergantung pada DAK, berbeda dengan Jawa Tengah yang lebih ditopang oleh PAD dan DAU. Dengan demikian, perbedaan pengaruh DAK antara kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Bengkulu mencerminkan variasi struktur fiskal, tingkat kemandirian daerah, serta porsi kontribusi DAK terhadap keseluruhan anggaran daerah masing-masing.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat dalam hasil pengujian signifikansi simultan (uji F) diatas menunjukkan hasil sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arti bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Saran

1. **Penguatan Kapasitas Aparatur Daerah:** Agar pengelolaan anggaran lebih efisien dan terarah, aparatur pemerintah daerah perlu dibekali dengan pelatihan serta peningkatan kompetensi dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan anggaran secara menyeluruh.
2. **Pengembangan Penelitian Selanjutnya:** Untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam, disarankan agar penelitian di masa mendatang mempertimbangkan variabel tambahan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), SILPA, serta memperluas objek penelitian ke provinsi lain guna mendapatkan gambaran yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Emayani, R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN. In *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* (Vol. 1, Issue 1).
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2018). DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 55–66.
- Nur, M. (2015). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DI SULAWESI SELATAN*.
- Septriani, S. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH. *Jurnal Manajemen*, 5, 183–194.